ANALISIS *PRO POOR* DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG

Analysis Of Pro Poor In The Regional Revenue And Expenditure Budget Of Pinrang Regency

Julfikram Hl. Idris
Email : julfikram97@gmail.com
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan Kode Pos 91131

Abstrak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pengelolaan dan penyaluran anggaran kemiskinan di Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang selama periode 2021-2023, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan anggaran kemiskinan mengalami fluktuasi yang signifikan. Rata-rata rasio efektivitas pengelolaan anggaran kemiskinan selama tiga tahun tersebut tercatat sebesar 44,79%, yang menunjukkan kategori tidak efektif. Pada tahun 2021, pengelolaan anggaran kemiskinan hanya mencapai 21,68%, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 27,74%. Meskipun ada peningkatan, keduanya tetap berada dalam kategori tidak efektif. Namun, pada tahun 2023, terjadi lonjakan signifikan menjadi 84,95%, yang masuk dalam kategori cukup efektif.Meskipun terjadi peningkatan di tahun 2023, fluktuasi efektivitas ini menunjukkan bahwa Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya berhasil dalam mencapai tujuan yang diharapkan dalam pengelolaan dan penyaluran anggaran kemiskinan. Hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program kemiskinan yang perlu diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Meskipun demikian, penting dicatat bahwa seluruh program yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik pada ketiga tahun tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai pengelolaan anggaran yang lebih efektif di masa depan, dibutuhkan evaluasi dan perbaikan sistem yang lebih terarah, agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Pinrang.

Kata Kunci: Efektivitas, Propoor, Pendapatan

Abstract

Based on the research conducted on the management and distribution of poverty allocation funds by the BAPPEDA Office of Pinrang Regency during the 2021-2023 period, it can be concluded that the effectiveness of poverty fund management fluctuated significantly. The average effectiveness ratio of poverty fund management over these three years was recorded at 44.79%, indicating an ineffective category. In 2021, the management of poverty funds only reached 21.68%, while in 2022, it increased to 27.74%. Despite the improvement, both years remained in the ineffective category. However, in 2023, there was a significant increase to 84.95%, placing it in the fairly effective category.Despite the improvement in 2023, this fluctuation in effectiveness shows that the BAPPEDA Office of Pinrang Regency has not fully succeeded in achieving the expected goals in the management and distribution of poverty funds. This reflects challenges in the planning, implementation, and oversight processes of poverty programs that need to be improved to achieve more optimal results. Nonetheless, it is important to note that all planned programs were successfully implemented in all three years. Therefore, to achieve more effective fund management in the future, an evaluation and more targeted improvements to the system are necessary, so that poverty alleviation efforts can have a greater impact on the community of Pinrang Regency.

Keywords: Effectiveness, Propoor, Income

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah lama yang pada umumnya dihadapi hampir di semua negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Kemiskinan seharusnya menjadi masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius. Kemiskinan bukanlah masalah pribadi golongan, bahkan pemerintah saja; akan tetapi, hal ini merupakan masalah setiap kita, warga negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga diharapkan dapat membantu

menekan tingkat kemiskinan di Indonesia. Data jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan menunjukkan angka yang semakin tinggi.

Hamid (2008) menyebutkan bahwa saat ini pengertian kemiskinan bukan hanya didasarkan pada aspek pendapatan dan konsumsi saja, namun mencakup aspek ketergantungan, harga diri, pendapatan, kesejahteraan dan sebagainya. Menurut SMERU melihat Research Institute, kemiskinan didefinisikan dengan melihat berbagai dimensi yaitu (Hamid, 2008):

1. Ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan pokok (sandang pangan dan papan).
2. Tidak mempunyai akses terhadap kebutuhan dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi.
3. Tidak mempunyai jaminan atas masa depan yang disebabkan tidak adanya investasi pendidikan dan keluarga.
4. Rentan terhadap masalah yang bersifat individual maupun missal
5. Mempunyai kualitas sumber daya manusia yang rendah dan sumber daya alam yang terbatas.
6. Tidak pernah ikut dalam kegiatan sosial di masyarakat
7. Tidak mempunyai akses terhadap kesempatan kerja dan pekerjaan yang mapan
8. Tidak mampu berusaha karena mempunyai kelainan fisik maupun mental

Ketidakmampuan sosial seperti anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok minoritas dan terpencil.Sejak terjadinya krisis multi dimensional yang melanda Indonesia 1997 yang ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto, jumlah penduduk miskin melonjak tajam. Bantuan IMF turun pada Oktober 1997 dalam bentuk pinjaman uang, terbukti belum bisa segera memperbaiki stabilitas ekonomi, yang akhirnya menjadi krisis yang semakin lama berkembang menjadi krisis yang berkepanjangan. Krisis yang berkepanjangan itu semata-mata bukan karena masalah ekonomi global saja, tapi juga karena kegagalan dalam mengelola pembangunan. Dimana kebijakan pembangunan lebih mementingkan aspek pertumbuhan daripada aspek pemerataan. Sebagai contoh, pembangunan secara terus menerus hanya dilakukan dikawasan Pulau Jawa dan Bali sedangkan masih banyak daerah terpencil di Indonesia bagian timur yang masih diabaikan.

Berbagai program dan kebijakan yang telah dibuat pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), Penanggulangan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi, Beras Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sebagainya sampai saat ini belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Semua terjadi disebabkan karena program hanya menitik beratkan pada salah satu dimensi dari gejala kemiskinan seperti politik, ekonomi, sosial yang tidak menyentuhsampai akar penyebab kemiskinan, misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT),tetapi kurang efektif karena banyak yang salah sasaran, bahkan membuka peluang penyalahgunaan dana hingga berakibat konflik sosialdi beberapa wilayah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5235) Secara umum menjelaskan bahwa tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan fiskal tahun 2011 yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat dengan tetap melanjutkan kebijakan pro growth, pro job dan pro poor. Dengan demikian tersirat bahwa prioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin menjadi salah satu program nasional, artinya tingkat kemiskinan diharapkan terus mengalami penurunan.Target pencapaian program penanggulangan kemiskinan dapat diukur berdasarkan skala waktu, yaitu target jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Target jangka pendek mengacu pada RKPD yang ditetapkan setiap tahun, sedangkan target jangka menengah mengacu pada perencanaan lima tahunan yang ditetapkan dalam RPJM Nasional serta RPJM Daerah. Target jangka panjang mengacu pada perencanaan pembangunan 25 tahunan yang ditetapkan dalam RPJP Nasional dan Daerah. Artinya, penanganan persoalan kemiskinan sudah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Program pengentasan kemiskinan daerah sebagai salah satu indikator penting kinerja pemerintah daerah di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan menjadi pintu untuk mengatasi masalah ini. Sehingga perlu untuk menelaah kinerja pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan. Berdasarkan uraian diatas maka dipandang perlu untuk menjabarkan data kemiskinan di kabupaten pinrang sebagai berikut:

Tabel 1, Data Kemiskinan Di Kabupaten Pinrang

Kategori Kemiskinan	Kategori Kemiskinan		
	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan	256.055	280.746	294.349
Persentase Penduduk Miskin (PO)	8.46	8.81	8.46
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.62	1.16	1.54
Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	0.44	0.26	0.40

Sumber: BPS Pinrang 2020 (Data diolah)

Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang, garis kemiskinan dari tahun 2021 – 2023 mengalami peningkatan. Menelah data tersebut, pemerintah dalam hal ini tidak mampu menekan atau meminimalisasi garis kemiskinan. Berdasarkan latar belakang yang ditemukan oleh peneliti memutuskan untuk mengangkat judul "Analisis pro poor dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Pinrang

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono, (2017), analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah- langkah yaitu:

Pengumpulan Data (*Data Collection*) Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

Reduksi Data (*Data Reduction*) Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menelusuri tema, gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya membuat dengan maksud menyisihkan datalinformasi yang tidak relevan.

Display Data pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian naratif. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclution Drawing and Verification*) Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus.

Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikaan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan foto pribadi,dokumen resmi, gambar, dokumen sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

Rasio Efektivitas Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Rasio Efektivitas = (Realisasi anggaran pengentasan kemiskinan)/(Target anggaran pengentasan kemiskinan) x 100. Mahmudi (2010:143) dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut:

Tabel 2, Berikut adalah tabel yang lebih terstruktur agar lebih jelas terbaca:

Persentase Kinerja Pemerintah	Kriteria
60%	Tidak efektif
60% - 80%	Kurang efektif
80% - 90%	Cukup efektif
90% - 100%	Efektif
100%	Sangat efektif

Sumber: Mahmudi (2010)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian berupa data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dari Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang selaku instansi yang menangani pengentasan kemiskinan.

a. Anggaran Kemiskinan

Adapun anggaran kemiskinan pada tahun 2021-2023 di Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :

Tabel 3, Anggaran Kemiskinan Tahun 2021-2023

PROGRAM	TAHUN	ANGGARAN (Rp)
BANTUAN SOSIAL	2021	650.000.000
	2022	500.000.000
	2023	3.125.000.000
TOTAL		**3.126.150.000**

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel Anggaran Kemiskinan menunjukkan bahwa pada tahun 2021 anggaran kemiskinan sebesar Rp.650.000.000 dan pada tahun 2022 anggaran kemiskinan sebesar Rp.500.000.000 serta pada tahun 2023 anggaran kemiskinan sebesar Rp. 3.125.000.000. Jadi anggaranyang dileluarkan oleh pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dari tahun 2017- 2019 sebanyak Rp.3.126.150.000

b. Realisasi Anggaran Kemiskinan

Adapun Realisasi Anggaran Kemiskinan pada tahun 2021-2023 di Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :

Tabel 4, Realisasi Anggaran Kemiskinan Tahun 2021-2023

PROGRAM	TAHUN	REALISASI ANGGARAN (Rp)
BANTUAN SOSIAL	2021	140.950.000
	2022	138.700.000
	2023	2.654.700.000

TOTAL	2.934.350.000

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan tabel Realisasi Anggaran Kemiskinan menunjukkan bahwa pada tahun 2021 realisasi anggaran kemiskinan sebesar Rp.140.950.000 dan pada tahun 2022 anggaran kemiskinan sebesar Rp.138.700.000 serta pada tahun 2023 anggaran kemiskinan sebesar Rp. 2.654.700.000 . Jadi realisasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan dari tahun 2017-2019 sebesar Rp. 2.934.350.000

c. Rekapitulasi anggaran dan realisasi

Adapun rekapitulasi anggaran dan realisasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan di kabupaten pinrang untuk anggaran menunjukkan bahwa dari tahun 2021-2023 anggaran kemiskinan sebesar Rp. 3.126.150.000 dan realisasi anggaran kemiskinan sebesar Rp. 2.934.350.000

d. Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kemiskinan

Berangkat dari tujuan penelitian dalam menjawab rumusan masalah penelitian, maka analisis yang akan digunakan adalah efektivitas pengelolaan Anggaran Kemiskinan pada Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari APBD Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang, maka adapun perhitungan pengelolaan Anggaran Kemiskinan adalah sebagai berikut (Mahmudii, 2010):

$$\text{RASIO EVEKTIVITAS} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Kemiskinan}}{\text{Anggaran Kemiskinan}} \times 100\%$$

Untuk perhitungan efektivitas pengelolaan Anggaran Kemiskinan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan rumus tersebut sebagai berikut :

1) Efektifitas Pengelolaan Anggaran Kemiskinan Tahun 2021

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Rp.140.950.000}}{\text{Rp.650.000.000}} \text{X } 100 \textbf{ \%}$$

$$= 21.68\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektifitas pengelolaan dan penyaluran bansos Pada tahun 2021 sebesar 21.68 % dengan kategori tidak efektif.

2) Efektifitas Pengelolaan Anggaran Kemiskinan Tahun 2022

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Rp. 138.700.000}}{\text{Rp.500.700.000}} \text{X } 100 \textbf{ \%}$$

$$= 27.74\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan efektifitas pengelolaaan Anggaran Kemiskinan diatas bahwa Pada tahun 2022 sebesar 27.74% dengan kategori tidak efektif.

3) Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kemiskinan Tahun 2023

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Rp. 2.654.700.000}}{\text{Rp.3.125.000.000}} \text{X } 100$$

$$=84.95\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan efektifitas pengelolaaan dan penyaluran anggaran kemiskinan diatas bahwa Pada tahun 2023 sebesar 84.95% dengan kategori cukup efektif.

e. Tingkat Efektivitas Anggaran Kemiskinan Kabupaten Pinrang

Adapun tingkat efektivitas anggaran kemiskinan dan realisasi anggaran yang telah dihitung seabagi berikut:

Tabel 5, Tingkat Efektivitas Anggaran Kemiskinan Tahun 2021-2023

Tahun	ealisasiAnggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Tingkat Efektifitas (%)	Keterangan
2021	140.950.000	650.000.000	21.68	TidakEfektif
2022	138.700.000	CukupEfektif	27.74	TidakEfektif
2023	2.654.700.000	3.125.000.000	84.95	Cukup Efektif
Rata-Rata			**44.79**	**Tidak Efektif**

Sumber : Data Diolah (2024)

Pembahasan

1. Anggaran Kemiskinan

Anggaran kemiskinan pada tahun 2021-2023 fluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2021 anggaran kemiskinan sebesar Rp.650.000.000 . Pada Tahun 2022 anggaran kemiskinan sebesar Rp. 5000.000.000 yang tentu berbeda pada tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2023 anggaran kemiskinan sebesar Rp.3.125.000.000 , hal ini menunjukkan adanya kenaikan anggaran yang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dari hasil analisis dan wawancara kepada beberapa staf menerangkan bahwa Hal ini disebabkan karena kenaikan pajak tiap tahunnya. Pajak yang dimaksud adalah pajak pertambahan nilai barang yang disalurkan dan harga barang yang meningkat karena bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa barang sehingga dapat meningkatkan jumlah anggaran yang digunakan.

a. Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kemiskinan

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata rasio efektivitas dari tahun 2021-2023 anggaran kemiskinan memiliki tingkat efektivitas sebesar 44.79 % dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2021 pengelolaan anggaran kemiskinan sebesar 21.68 % dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2022 pengelolaan anggaran kemiskinan sebesar 27.74 % dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2023 pengelolaan anggaran kemiskinan sebesar 84.95 % dengan kategori cukup efektif.

Dari tahun ke tahun efektifitas pengelolaan dan penyaluran anggaran kemiskinan mengalami fluktuasi. Dengan ini pihak Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang dalam mengelola dan menyalurkan anggaran kemiskinan kepada masyarakat belum mengalami kemajuan. dari hasil ketiga tahun tersebut bahwa Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang dalam pengelolaan dan penyaluran anggaran kemiskinan dikategorikan Cukup Efektif. Pada tahun 2021-2023 semua program Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan sepenuhnya.Ini menjadi salah satu penilaian bagi peneliti bahwa Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang dalam mengelola dan menyalurakn Anggaran Kemiskinan kepada masyarakat sudah dapat dikategorikan CukupEfektif.

Dari hasil wawancara dengan Staf Bidang Keuangan BAPPEDA Kabupaten Pinrang mengemukakan bahwa terjadinya fluktuasi anggaran kemiskinan di Kabupaten Pinrang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1) Kurangnya penyampaian informasi dan data mengenai perkembangan pelaksanaan penanggulangan kemiskianan karena adanya mutasi pejabat. Selain dari pada itu ada masyarakat yang mengaku miskin lantaran merasa cukup enak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah yang dibingkai dalam Program Keluarga Harapan (PKH), ini berpengaru dengan penurunan angka kemiskinan.
2) Belum adanya sistem informasi terpadu mengenai laporan kinerja dan proses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata rasio efektivitas dari tahun 2021-2023 anggaran kemiskinan memiliki tingkat efektivitas sebesar 44.79 % dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2021 pengelolaan anggaran kemiskinan sebesar 21.68 % dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2022 pengelolaan anggaran kemiskinan sebesar 27.74 % dengan kategori tidak efektif. Pada tahun 2023 pengelolaan anggaran kemiskinan sebesar 84.95 % dengan kategori cukup efektif.

Dari tahun ke tahun efektifitas pengelolaan dan penyaluran anggaran kemiskinan mengalami

fluktuasi. Dengan ini pihak Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang dalam mengelola dan menyalurkan anggaran kemiskinan kepada masyarakat belum mengalami kemajuan. dari hasil ketiga tahun tersebut bahwa Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang dalam pengelolaan dan penyaluran anggaran kemiskinan dikategorikan Cukup Efektif. Pada tahun 2021-2023 semua program Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan sepenuhnya.Ini menjadi salah satu penilaian bagi peneliti bahwa Dinas BAPPEDA Kabupaten Pinrang dalam mengelola dan menyalurakn Anggaran Kemiskinan kepada masyarakat sudah dapat dikategorikan Cukup Efektif.

Saran

Adapun saran-saran dari hasil penilitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerinta Kabupaten Pinrang perlu lebih akurasi dalam pengambilan data penduduk miskin agar dana pengentasan kemiskinan dalam anggaran daerah dapat teralokasikan dengan tepat sasaran dan merata kepada seluru penduduk miskin Kabupaten Pinrang.
2. Dalam menyusun anggaran pengentasan kemisikan, Pemerintah perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat selain dari pada itu Pemerintah harus meningkatkan keterbukaan atau ada proses sosialisasi kegiatan-kegiatan yang diprogramkan pemerintah. Kemudian pemerintah juga perlu kerja maksimal dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan tersebut agar anggaran kemiskinan dapat teralisasi dengan efektif.
3. Perlu kajian aspek sosial dalam memahami realitas penduduk miskin dan mengindari kepentingan politik dalam praktek penganggaran penduduk miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Debby ch. Rotinsulu, avriano r. Ten da, luciana m. Leonufina (2010) Analisis Dampak Anggaran Pendapatan Dan Belanja Deran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengagguran Di Sulawesi Utara. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Vol. 18, No. 3 (2016)

Dewi Irma Septiyani Paulus, Rosalina A.M. Koleangan, Daisy S.M.Engka (2017)Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah Di Kota Bitung.Jurnal Pembangunan Ekonomidan Keuangan Daerah. Vol. 18, No. 3 (2016)

Della, Juliani (2019).Pengaruh Dana Transfer dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengantasan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.Diploma. Universitas Andalas

Garrison, Noreen, dan Brewer. (2007). Akuntansi Manajerial. Edisi 11.Diterjemahkan oleh Nuri Hinduan dan Edward Tanujaya.Salemba Empat. Jakarta

Kasmiati, K., Arham, A., & Suhardi, D. (2023). ANALISIS ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018-2022. *Journal AK-99*, *3*(2), 296-305.

Mc. Khuzaironi (2015).Pengaruh Kebjaksanaan Apbd Dan Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro: Semarang

Nuryadin, R. (2018). Analisis Perbandingan Metode Harga Pasar Dengan Metode Harga Biaya-Plus Dalam Menetapkan Harga Jual Baranglelang Pada Pt. Adira Dinamika Finance Tbk Cabang Parepare.

Suroso.(2006), Kajian Kapasitas Sungai Logawa dalam Menampung Debit Banjir Menggunakan Program HEC-RAS. Jurusan Teknik Sipil Universitas SoedirmanPurwokerto,.

Sinurat, Riki Kurniawati, 2019, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Medan. Skripsi. Universitas HKBP Nommensen.

Mardiasmo.(2009), Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi. Jurnal Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Kemandirian Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (studi empiris pada pemerintah kabupaten/kota di pulau jawa periode 2006-2010).

Munandar, H., Kurniawan,F. Dan Santoso, P.(2007), Mencari Hubungan antara Kebijakan Moneter

dengan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan.Kajian Menggunakan Data Regional Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.

Nurhapisa, N., & Harun, H. (2022). ANALISIS BANTUAN SOSIAL DANA CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) KHUSUS BANTUAN DANA SOSIAL PADA PUSAT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) BAKARU KABUPATEN PINRANG. *Journal AK-99*, *2*(1), 46-53.

Parman, P., Sampara, N., & Handini, M. (2023). Restrukturisasi Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Pembantu Parepare. *DECISION: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *4*(1), 91-98.

Riskawati, dan Abdul.(2013), Faktor Terjadinya Gelandangan dan Pengemis (Studi pada Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung).http://www.academia.edu/ diakses dan diunduh pada 15 September 2017.